

ARTIKEL

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Rizky Kustyardhi, Sri Suwitri, Titik Djumiarti

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrack

Trash problem becomes quite serious problems that faced by government of Semarang city. The volume of trash grows every year. The Law No. 18 Year 2008 about Trash Management is a reference for government of Semarang city to change the way of trash management from get-haul waste into friendly environmental trash management by using the principle of the 3Rs (*reduce, recycle, dan reuse*).

The purpose of this study is not only to describe and to analyze the implementation of integrated trash management in Semarang city but also to identify the inhibiting factors that occur in integrated trash management of Semarang city.

To answer the problem and the purpose of this research, the writer uses descriptive qualitative approach by using management theory that focuses on the function of implementation of the plan, staffing, and coordination.

The research shows that the inhibitor in the integrated trash management in Semarang city due to inadequate government budget, the difficulties in marketing the products of processed junk, poor coordination, and low public awareness in trash management.

To improve the integrated trash management in Semarang city, the advices that can be given by writer to the Department of Hygiene and Gardening of Semarang city are to cooperate with the agencies that concerned in the problems of trash, to improve the coordination systems, to enforce regulations strictly, and to raise awareness continually in order to be wise in trash management.

Keywords: trash management, improvement of coordination, enforce regulations

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah sampah menjadi permasalahan yang cukup serius yang juga dihadapi oleh Kota Semarang. Masalah sampah muncul sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai

ibu kota provinsi Jawa Tengah dan termasuk salah satu kota perdagangan yang terbesar dengan jumlah penduduk yang cukup padat sudah barang tentu berpotensi memproduksi sampah yang besar dan membutuhkan penanganan yang serius.

Di Kota Semarang pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan mulai tahun 1992 dengan disediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jatibarang. Namun, upaya Pemkot Semarang tersebut ternyata belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Volume sampah di TPA Jatibarang semakin bertambahnya tahun ternyata tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah.

Secara teknis, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang menangani permasalahan sampah dengan cara mengambil, menampung di Tempat Penampungan Sampah (TPS), dan membuangnya ke TPA Jatibarang. Dengan pola penanganan semacam ini, Kota Semarang akan selalu menghadapi kendala kurangnya tempat penampungan sampah dan beberapa permasalahan sebagai akibat kompleksitasnya permasalahan perkotaan.

Untuk mengantisipasi kelebihan muatan di TPA Jatibarang tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui DKP Kota Semarang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di wilayah kecamatan. Pengelolaan sampah terpadu bertujuan untuk mengurangi volume timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang, mengantisipasi penggunaan lahan TPA yang semakin terbatas, mengurangi biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

B. TUJUAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan metode yang disesuaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sampah terpadu di wilayah Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah teori manajemen yang lebih menitikberatkan pada fungsi *actuating* yang menitikberatkan pada fungsi pelaksanaan rencana, *staffing*, dan koordinasi.

Luther M. Gulick (Handoko, 2003: 11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu (*science*) pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Terry dan Rue (2001:1) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau penerahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Actuating, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian

agar tujuan-tujuan dapat tercapai (Terry, 2009: 17).

Ada berbagai macam daftar pertanyaan yang tersedia untuk membantu terlaksananya sebuah rencana. Alat-alat bantu itu berkisar pada lima pertanyaan (5W + 1H). Urutan-urutannya adalah sebagai berikut (Terry, 2009: 67-68):

- a. Mengapa (*why*) harus dikerjakan? Pertanyaan tersebut mengungkapkan urgensi pekerjaan tersebut.
- b. Apa (*what*) yang diperlukan? Jawabannya menunjukkan jenis dan jumlah kegiatan berikut peralatan yang dibutuhkan.
- c. Dimana (*where*) akan dikerjakan? Penekanannya pada tempat pekerjaan tersebut akan dikerjakan.
- d. Kapan (*when*) akan dikerjakan? Disini ditekankan pada pertimbangan waktu. Kapan dimulai dan berakhirnya setiap bagian pekerjaan.
- e. Siapa (*who*) yang akan mengerjakannya? Pertanyaan tersebut untuk mengetahui jenis ketrampilan dan pengalaman yang ada untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan itu dengan memuaskan.
- f. Bagaimana (*how*) melaksanakannya? Pertanyaan tersebut ingin mengarahkan perhatian kepada cara menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Staffing atau menyusun staf organisasi adalah suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi (Keban, 2008: 95). *Staffing* perlu sekali dilakukan

dalam menentukan pembagian tugas. dan wewenang dengan tepat. Praktisnya, penyusunan staf sebuah organisasi diawali dengan penyusunan tugas-tugas yang dibentuk dalam bentuk uraian pekerjaan (*job description*) kemudian dibuat spesifikasinya.

Awal dari kegiatan *staffing* ialah membuat tugas, pada umumnya memakai sistem identifikasi tugas (Terry, 2009: 114). Setiap jabatan dalam struktur organisasi tentu mempunyai isi atau beban tugasnya masing-masing yang mencakup kewajiban, tugas yang harus dilaksanakan, tanggung jawab, sifat-sifat utama dari pekerjaan tersebut dan hasil-hasil yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu uraian tugas.

Menurut Henry Fayol (Siswanto, 2006: 35), *coordinating* atau pengkoordinasian berarti memastikan bahwa sumber daya dan aktivitas organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan.

Keban (2008: 95) menjelaskan bahwa *coordinating* adalah suatu pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target atau tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju arah berlainan dengan irama atau kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula, tanpa koordinasi, masing-masing individu atau bagian akan bekerja sesuai dengan kepentingannya masing-masing dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan.

Sedangkan Terry (Sutarto, 2002: 144) menjelaskan bahwa koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk

menciptakan kepastian kuantitas, waktu, dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Kunci dari kegiatan koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Koordinasi bergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi (Handoko, 2003: 196).

D. METODE

1. Desain Penelitian menggunakan tipe Penelitian Deskriptif.
2. Lokasi dan Fokus Penelitian
 - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang
 - Penelitian ini berfokus pada praktek pengelolaan sampah terpadu yang dilaksanakan di Kota Semarang.
3. Sumber Data
Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunde
4. Tehnik penentuan informan penelitian menggunakan *purposive sampling*
5. Tehnik pengumpul data dengan wawancara, dan dokumentasi
6. Tehnik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing*).

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Rencana

Peengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan setelah diterbitkannya UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dari lingkungan masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga volume sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang bisa dikurangi dari tataran rumah tangga.

Untuk bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu di perlukan beberapa sarana pendukung untuk mengelola sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang memberlakukan beberapa syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan sarana pendukung tersebut.

Pelaksana pengelolaan sampah terpadu adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang berperan sebagai pembina KSM. Selain itu, Pemkot Semarang juga melibatkan aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) dengan menggunakan berbagai sarana pendukung yang dimiliki oleh para KSM. Sampah dipilah menjadi dua jenis, organik dan non organik. Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah non organik ada yang diolah menjadi barang kerajinan dan ada pula yang langsung dijual.

Staffing

KSM bertugas sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan untuk pengangkutan sampah

dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilaksanakan oleh aparat dari masing-masing kecamatan di Kota Semarang. Selain pihak kecamatan, pihak kelurahan juga berkewajiban dalam menangani permasalahan di lingkungan kelurahannya. Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mempunyai tugas dalam pembinaan para KSM. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa KSM kehilangan para anggotanya karena mereka merasa tidak bisa berkembang di KSM dan adanya keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA Jatibarang.

Dalam pengelolaan sampah terpadu tidak semua KSM mendapatkan penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Khususnya hal tersebut dialami oleh para KSM yang mendapatkan sarana bantuan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Akibatnya adalah kualitas produk olahan sampah yang dihasilkan belum diakui oleh masyarakat dan tidak mampu bersaing di pasaran.

Koordinasi

Dalam perkembangannya, program pengelolaan sampah terpadu kurang begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya suatu bentuk koordinasi yang berkesinambungan yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dilakukan jika pemerintah akan menghadapi suatu momen atau kegiatan tertentu yang membutuhkan kontribusi para KSM.

Dalam hal ini, koordinasi antara pihak pemerintah dengan KSM sangat diperlukan karena dengan adanya koordinasi para KSM akan merasa

diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga keberlanjutan jalannya TPST bisa dikendalikan oleh pemerintah.

B. ANALISIS

Pelaksanaan Rencana

Setiap hari TPA Jatibarang menampung sampah dari seluruh wilayah di Kota Semarang. Untuk mencegah *overload*, sampah harus dikurangi secepat mungkin dari sumber sampah yaitu dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya Pemkot Semarang untuk mengantisipasi besarnya muatan sampah di TPA Jatibarang. Pengurangan sampah yang dilakukan mulai dari lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memilah sampah yang memungkinkan untuk didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali.

Pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan prinsip 3R sebenarnya sudah dirintis di Kota Semarang sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga lain yang memberikan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dan tata cara mengelola sampah.

Sedangkan tempat pelaksanaannya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimana KSM berada di kelurahan tertentu. Tempat yang dijadikan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu ditentukan oleh masyarakat setempat sehingga bisa meminimalisir munculnya permasalahan terganggunya masyarakat di sekitar TPST.

Untuk mendapatkan sarana pendukung pengelolaan sampah tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

menyatakan bahwa masyarakat harus mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dengan pengajuan proposal tersebut, pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang akan menilai seberapa serius keinginan masyarakat dalam mengelola sampah. Namun berdasarkan temuan yang didapatkan oleh penulis di lapangan, KSM yang mengelola TPST (khususnya yang didanai oleh APBD Kota Semarang) menyatakan tidak mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan sarana pendukung pengelolaan sampah terpadu. Para KSM tersebut menyatakan bahwa mereka ditunjuk untuk mengelola sampah di tempat yang telah didirikan dan peralatannya telah disediakan oleh pemerintah kota.

Dalam program pengelolaan sampah terpadu ini, pihak yang lebih mempunyai peran penting adalah masyarakat yang tergabung dalam KSM sebagai pelaksana aktivitas pengelolaan sampah terpadu di masing-masing TPST. Sedangkan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang berperan sebagai pembina. Selain itu, pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan juga berperan dalam pengelolaan sampah secara umum di Kota Semarang.

Pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Namun tidak semua KSM melakukan kegiatan pendaur ulangan sampah, khususnya untuk sampah jenis non organik. Hampir semua KSM yang mengelola sampah mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos baik dengan menggunakan teknik takakura maupun dengan menggunakan teknologi mesin. Sedangkan kegiatan pendaurulangan sampah jenis non organik menjadi

aneka ragam jenis kerajinan hanya dilakukan oleh sebagian kecil KSM. Sebagian besar KSM yang lain lebih memilih menjual sampah non organik kepada pengepul sampah.

Staffing

Dalam pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang melalui Seksi Pengolahan Limbah berperan sebagai pembina KSM. Pemerintah kelurahan dan kecamatan juga mempunyai tugas dalam terlaksananya program pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang. Pemerintah kelurahan mempunyai tugas atau kewajiban untuk menangani masalah kebersihan di tingkat kelurahan. Sedangkan pemerintah kecamatan mempunyai tugas atau kewajiban pengangkutan sampah menuju TPA Jatibarang yang berasal dari TPST atau TPS. Keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA lebih disebabkan karena keterbatasan sarana truk pengangkut yang dimiliki oleh pihak kecamatan.

Pengetahuan pengelolaan sampah yang sekarang ini dimiliki oleh masyarakat yang tergabung dalam KSM diperoleh dari penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun LSM dan berbagai lembaga lainnya. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang menyatakan bahwa selain memberikan bantuan berbentuk fisik, penyuluhan dan pelatihan juga diberikan kepada para KSM yang mengelola sampah di TPST. Namun, menyatakan demikian. Bahkan hampir semua KSM yang menerima bantuan TPST yang anggarannya berasal dari APBD Kota Semarang juga menyatakan tidak memperoleh penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola sampah.

Koordinasi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mengakui bahwa memang suatu bentuk koordinasi secara formal memang belum dilakukan karena keterbatasan anggaran. Dengan adanya forum koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan seluruh KSM yang mengelola sampah sangat diharapkan oleh para KSM. Para KSM berharap dengan adanya forum tersebut para KSM bisa saling bertukar pikiran baik dengan aparat pemerintah maupun dengan sesama KSM tentang kondisi terkini yang dialami oleh para KSM.

Dampak dari minimnya atau buruknya koordinasi ini adalah terdapat para KSM yang sudah tidak produktif lagi dalam mengelola sampah. Permasalahan seperti ini kurang mendapatkan respon positif dari pemerintah kota. Artinya perlu ada perubahan pola koordinasi yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

Faktor Penghambat

Keterbatasan anggaran menjadi alasan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk meningkatkan pengelolaan sampah terpadu baik secara kuantitas maupun kualitas. Kendala biaya juga dialami oleh beberapa KSM karena kesulitan memasarkan produk olahan sampah. Akibatnya produktivitas menurun. Karen KSM tersebut kekurangan modal.

Buruknya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan para KSM berdampak pada tidak adanya pengawasan terhadap aktivitas para KSM. KSM yang mengalami kesulitan dan tidak bisa mengatasinya tidak segera mendapatkan tanggapan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang untuk

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Pengelolaan sampah terpadu tidak bisa hanya dipasrahkan begitu saja kepada pemerintah maupun para KSM. Kesadaran masyarakat di luar KSM dalam mengelola sampah rumah tangga akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi program ini. Jika masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengelola sampah, setidaknya berkenan untuk memilah sampah dari jenis organik dan non organik tentu akan meringankan beban kerja para KSM.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Aktivitas pengelolaan sampah terpadu tidak harus membutuhkan TPST, tempat khusus untuk mengelola sampah dan peralatan atau teknologi yang canggih. Pengelolaan sampah terpadu bisa dilaksanakan langsung dari masing-masing rumah tangga. Masih banyaknya KSM yang tidak mendapatkan pelatihan dan penyuluhan dalam mengelola sampah berpengaruh terhadap kemampuan produksi masyarakat dalam mendaur ulang sampah.

Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk melibatkan pemerintah kecamatan maupun kelurahan bersama masyarakat telah didukung oleh sarana yang memadai. Sayangnya, pihak Pemkot Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sarana pendukung tersebut tidak disertai kemampuan masyarakat yang memadai pula. Tidak semua KSM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu mendapatkan penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Akibatnya adalah produk olahan sampah yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasaran.

Tidak adanya koordinasi secara berkala, menjadikan pengawasan pemerintah terhadap KSM lemah. KSM yang kesulitan dalam menghadapi masalah tidak segera mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah telah memberikan sarana pengelolaan sampah terpadu, namun perihal keberlangsungan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang bida diajukan berdasarkan kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerjasama antar lembaga-lembaga yang mempunyai fokus menangani persoalan sampah di Kota Semarang
- b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembina dengan masyarakat sebagai pelaksana pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang
- c. Mempertegas pelaksanaan peraturan yang mendukung pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Terry, George R dan Rue Leslie W. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.